

## Konsep Kedudukan Raja pada Awal Berdirinya Kerajaan Mataram Islam

Andriyanto<sup>1</sup>

<sup>a</sup> Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, Indonesia

<sup>1</sup> [andri\\_rey@yahoo.co.id](mailto:andri_rey@yahoo.co.id)

\* Corresponding Author



Received 5 April 2022; accepted 5 Mei 2022; published 30 Juni 2022.

### ABSTRACT

Penelitian ini berjudul Konsep kedudukan Raja pada Awal Berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana konsep kedudukan Raja pada awal berdirinya kerajaan Mataram Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Historis yang terdiri dari heuristik, kritik intern ekstern, interpretasi, dan Historiografi*. Hasil dari penelitian ini adalah Kekuasaan raja tidak dapat dilepaskan dari konsep Spiritual yang berasal dari kultur atau budaya India, yaitu kepercayaan adanya kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara jagat raya dan dunia manusia. Konsep Dewa Raja yang dipandang sebagai pusat dari kosmos dan dari diri raja terpancar kekuatan yang terpengaruh pada alam pikir manusia di wilayah kerajaan Mataram. Anggapan ini dikaitkan dengan kepercayaan magis dari wahyu raja (pulung raja) dan konsep tentang pewaris keturunan wahyu raja.

### KEYWORDS

Raja, Dewa Raja, Kerajaan Mataram Islam

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



### 1. Pendahuluan

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dilalui dengan pasang surutnya sistem pemerintahan yang berubah menyesuaikan perubahan yang terjadi tersebut tidak luput juga saat kerajaan Mataram Islam mendudukan konsep raja di posisi yang sangat penting. Keberadaan kerajaan lokal yang ada di Indonesia adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa. Konsep kepemimpinan negara di Indonesia selalu menempatkan rakyat sebagai bagian dari bagian yang dipimpinnya, tetapi kita bisa melihat bagaimana pengaruh kebudayaan akan terus mengisi kekosongan kepemimpinan dalam setiap masa sebelumnya dan mempengaruhi masa sesudahnya. Pengaruh kebudayaan Hindu Budha masih sangat saat munculnya kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Menempati bekas kerajaan Mataram Kuno secara tidak langsung juga memberikan pengaruh pada perkembangan Mataram Islam pada awal pembentukannya.

Sejak terjadi pergeseran politik di Jawa tahun 1574, yaitu Pajang yang berhasil menggantikan Demak, terjadi pula perubahan corak pemerintahan dari kekuasaan pantai ke pedalaman (Andriyanto, Muslikh, 2019: 16). Bagaimana Sejarah Kerajaan Mataram Islam yaitu dimulai saat Ki Ageng Pemanahan membantu Sultan Hadiwijaya sebagai Raja Pajang untuk mengalahkan Arya Penangsang dari wilayah Jipang. Oleh karena atas jasanya itu, Ki Ageng Pemanahan menandatangani hadiah tanah di wilayah hutan Mentaok kalau sekarang tepatnya di Kotagede Yogyakarta. Pada tahun 1577 Ki Ageng Pemanahan waktu itu mulai mengembangkan tanah tersebut menjadi wilayah yang makmur. Setelah meninggalnya Ki Ageng Pemanahan kedudukannya dilanjutkan putranya yang bernama Danang Sutawijaya (Raden Ngabehi Loring Pasar). Setelahnya Sutawijaya melakukan pemberontak pada kerajaan Pajang yang saat itu Hadiwijaya masih menjadi rajanya. Pertempuran tersebut dimenangkan Danang Sutawijaya dengan kekuatan yang sebetulnya tidak sepadan dengan

kekuatan Kerajaan Pajang, walaupun hanya dengan kekuatan yang tidak sebanding tersebut Sutawijaya berhasil mengalahkan kerajaan Pajang. Setelah Sultan Hadiwijaya mengalami konsi kesehatan yang mulai memburuk sehingga sampai meninggal. Sutawijaya memproklamkan kerajaan Mataram (Ardian Kresna. 2011: 28), (Dr. H.J. De Graaf. 1987).

Sutawijaya adalah pendiri dan sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam, setelah itu terus menghadapi banyak masalah, terutama dari para bupati-bupati yang ada di pantai utara Jawa yang dahulu bagian dari kerajaan Pajang. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam di awal-awal tidak berjalan dengan mudah. Para raja pesisir tersebut secara terus menerus menjalankan pemberontakan dikarenakan keinginan melepaskan dan ingin menjadi kerajaan yang berdaulat atau merdeka. Walaupun seperti Sutawijaya terus berhasil menjalankan perluasan wilayah sehingga dapat menahklukkan hampir seluruh wilayah Jawa Tengah dan wilayah di Jawa Timur (Ardian Kresna. 2011: 28), (Dr. H.J. De Graaf. 1987).

Studi Soemarsaid Moertono dapat dipahami bahwa raja menurut masyarakat Jawa adalah pusat dunia. Sehingga lebih lanjut konsepsi menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh raja adalah dalam upaya membenarkan legitimasi kedudukannya ini di dalam kekuasaan yang besar dan luas, oleh karena itu rakyat dapat menerimanya dengan baik (Soemarsaid Moertono. 1985). Kondisi ini menyebabkan segala permasalahan dikembalikan pada konsepsi pokok dalam konsep kekuasaan Jawa, ialah magis-relijius. Konsep magis religius tersebut senantiasa akan menjadi pedoman bagi raja dan rakyat. Oleh sebab itu, sehingga hubungan raja dan rakyat diibaratkan hubungan antara kawula gusti dimana didalamnya mencakup juga hubungan yang bersifat pribadi (Drs. Supriadi, M.Hum., 2017: 13). Hal ini juga terlihat dari penjelasan Kuntowijoyo bagaimana setelah runtuhnya kerajaan Demak dengan hierarki yang sangat keras karena masyarakat Islam pada waktu itu menjadi berda di golongan bawah. Oleh sebab itu masyarakat Islam kemudian mempunyai keinginan atau cita-cita dalam bentuk kesadaran yang bisa digambarkan sebagai kesadaran mistis-religius (Kuntowijoyo, 2017: 24).

Saat kita membahas tentang konsep raja kita tak bisa melepaskan diri dari konsep birokrasi kerajaan. Bagaimana tentang penjelasan Birokrasi adalah sistem di mana di dalamnya ada posisi dyang diduduki oleh pejabat-pejabat karier yang tidak mengenal dan dikenal dalam prinsip monarkhi yang bersifat turun-temurun (David Betham, 1990:70). Birokrasi adalah: (1) Sistem pemerintah yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang teguh pada jenjang jabatan, (2) Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh kaum pegawai negeri, (3) Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat, serba menurut aturan (adat dan sebagainya), banyak liku-likunya (Menurut Poerwadarminta, 1976:144).

Birokrasi tidak bisa lepas dari pengertian birokrat yaitu pegawai yang bertindak sebagai pemegang dan anggota birokrasi. Kemudian pengertian konsep kerajaan Mataram merupakan suatu lingkaran konsentris di mana raja sebagai pusatnya. Raja ialah sumber satu-satunya dari segenap kekuatan, kekuasaan, dan raja pemilik dari segala yang ada di dalam kerajaan. Kehormatan, kekuasaan, keadilan, dan kemakmuran serta kebijaksanaan kesemuanya terdapat pada diri seorang raja, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sistem yang teratur guna menyampaikan semua kebijaksanaan raja ini kepada rakyatnya. Di dalam sistem kerajaan yang diatur sedemikian

rupa tersebut agar bisa mendapatkan dukungan secara resmi yang mutlak atas status berserta kekuasaan yang penuh (Selo Soemardjan, 1985:61).

Wujud ideal kekuasaan Jawa dapat tersecrmin dari kesatuan politik yang dikombinasi dengan terpadu dengan konsep dari kekuasaan jagat raya ini hal ini terlihat pada gelar yang digunakan oleh raja keturunan Mataram (Eddy Supriyatna Marizar. 2013: 92). Kondisi Islam sesudah kejatuhan kerajaan Demak masyarakat Islam menjadi bentuk patrimonial. Masyarakat Islam tidak berada pada golongan atas, melainkan ada di golongan bawah (Kuntowijoyo, 2017: 24). Karena alasan itu penelitian ini ingin mentehui konsep kedudukan raja pada awal berdirinya kerajaan mataram Islam.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode *historis* yaitu suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Penggunaan metode sejarah dalam kajian ini dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu: (1) Heuristik, mengumpulkan bahan-bahan atau sumber melalui studi kepustakaan, (2) Kritik sumber, menyeleksi data-data yang telah terkumpul melalui kritik intern dan kritik ekstern, (3) Interpretasi, menafsirkan fakta-fakta yang dihasilkn dari data yang sudah dikumpulkan, (4) Historiografi, menuliskan dalam bentuk cerita yang mampu dipertanggung jawabkan (Daliman, 2012: 27), (Dudung Abdurrahman, 103).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kekuasaan raja tidak dapat dilepaskan dari konsep Spiritual yang berasal dari kultur atau budaya India, yaitu kepercayaan adanya kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara jagat raya dan dunia manusia. Menurut kepercayaan itu manusia selalu berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber pada penjuru mata angin, bintang-bintang, dan pada planet-planet. Tenaga-tenaga itu dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi juga membawa kehancuran. Hasil yang diperoleh tergantung pada kemampuan atau tidaknya individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama sekali raja, dalam menyelaraskan kehidupan dan kegiatan kelompok masyarakat dengan jagat raya. Keselarasan antara kerajaan dan jagat raya dapat dicapai dengan cara menyusun kerajaan itu sebagai jagat raya yang berbentuk kecil (Darsiti Suratman, 1989: 3). Dewa raja ialah dari konsep kebudayaan Hindu-Buddha yang memuja dan menganggap bahwa raja mempunyai sifat kedewaan, wujud pemujaan seperti ini terdapat danberkembang di wilayah Asia Tenggara (Sengupta, Arputha Rani (Ed.): 2005).

Konsep ini berhubungan dengan sistem kerajaan yang menganggap bahwa raja mempunyai sifat illahiah, bisa digambarkan seperti dewa yang hidup di dunia, dianggap titisan dewa yang tertinggi, seperti dalam kebudayaan hindu yaitu dihubungkan dengan dewa Siwa atau dewa Wishnu. Konsep tersebut berhubungan dengan gagasan India mengenai raja jagat cakrawartin. Secara sudut pandang politik, gagasan tersebut dianggap sebagai suatu usaha penglegitimasiian atau justifikasi dalam hal kekuasaan raja dengan menggunakan pendekatan sistem keagamaan.

Sedangkan di dalam bahasa Sanskerta istilah dewa-raja ini mempunyai makna "raja para dewa" atau "raja yang juga sebagai (titisan) dewa". Keberadaan masyarakat dewa Hindu, jabatan dewa tertinggi ialah disematkan kepada dewa Siwa, terkadang dewa Wisnu, atau juga dewa Indra. Kerajaan langit dimana tempat para dewa berada adalah di swargaloka adalah bayangan kerajaan fana di bumi, konsep ini melihat bagaimana raja adalah dewa yang hidup di atas bumi.

Negara kosmis erat kaitannya dengan konsep raja yang bersifat dewa, dipercayai bahwa keberadaan seorang raja sebagai titisan dari dewa. Konsep raja-dewa atau ratu-binathara ini berlaku pada periode kerajaan Islam tidak meletakkan atau memposisikan raja di dalam kedudukan yang sama dengan kedudukan Tuhan, akan tetapi sebagai khalifutullah, sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini (Soemarsaid Moertono. 1985: 34).

Ratu-bimathara mempunyai tiga macam wahyu, yaitu yang pertama adalah wahyu nubuah, yang kedua adalah wahyu kukumah, dan yang ketiga adalah wahyu wilayah. Arti wahyu *nubuah* di sini ialah wahyu yang menempatkan raja sebagai wakil Tuhan. Sedangkan Wahyu kukumah ialah wahyu yang memposisikan raja sebagai sumber hukum beserta wewenang murbuwasesa yang berarti sebagai penguasa dan dapat melakukan itu dengan kekerasan. Kedudukan raja sebagai sang murbawasesa menyebabkan raja mempunyai kekuasaan yang tak terbatas dan segala keputusan yang diambilnya tidak boleh dilawan, hal itu disebabkan dipercayainya keputusan sebagai kehendak Tuhan. Wahyu wilayah sebagai wahyu yang ketiga memberikan *pndam pangauban*, yang mempunyai arti memberikan perlindungan dan penerangan kepada rakyatnya. Kekuasaan seorang raja yang tidak terbatas tersebut diimbangi dengan tindakan perlindungan kepada rakyat-rakyatnya. Selain wakyu yang disebutkan itu ada pula wahyu kraton, wahyu kedhaton atau juga menyebutnya wuhyu cakraningrat. Bagaimana seseorang yang memperoleh wahyu cakraningrat berarti akan menjadi raja. Di kerajaan yang tidak memiliki putra mahkota, bagaimana konsep wahyu cukraningrat masih sangat berakar kuat saat proses menentukan pengganti raja yang mangkat sehingga hal itu menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam kerajaan (Darsiti Suratman, 1989. 4).

Konsep ratu-binathara akan lengkap jika ditambah dengan kata lai sehingga menjadi gung binathara bau dendha nyakrawati, berbudi bawa leksana ambeg adil paramarta. Konsep ini berdimensi empat hal, gung beruthara bau dendha nykrawati berarti raja besar seperti dewa yang memiliki kekuatan sebagai penguasa dunia, sedang dua dimensi yang lain berisi penjelasan sebagaimana seorang harus melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya. Disebutkan raja harus berbudi artinya budi baiknya seakan-akan terus mengalir karena penuhnya, bawa laksana berani memegang teguh kata-katanya, dan ambeg adil paramarta yang mengandung arti bersifat adil serta bermurah hati. Dengan demikian dapat dikatakan raja dengan sepasang ungkapan tersebut pada kalimat di bagian akhir yang tampaknya berlawanan dengan yang disebut di bagian depan ternyata saling melengkapi, sehingga keseimbangan dapat tercapai. Ratu binathara memiliki berbagai tingkatan. Disebut Ratu-binathara utama jika raja benar benar melaksanakan berbudi bawa jeksana ambeg adil paramarta. Jika darma ini kurang diperhatikan maka raja tingkat *nistha* (rendah, hina) (Darsiti Suratman, 1989: 5).

Menurut Serat Witaradya sifat Ratu binathara utama tercakup dalam panca praptama (lima yang terbaik), yaitu mulat (mawas diri dan waspada), amilala (memanjakan, memelihara dengan

baik), miladarma (melaksanakan darma untuk mencapai kesejahteraan batin), amilata (berbuat supaya orang lain suka padanya), dan parimarma (belas kasihan dan suka memaafkan) (Darsiti Suratman, 1989: 6).

Memperhatikan adanya tiga macam kategori di atas, maka raja yang memerintah atau memimpin rakyatnya hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya (kasekten) saja, tidak dapat disebut raja utama. Kasekten bukan satu-satunya komponen untuk melaksanakan kekuasaan. Seperti halnya dengan pemimpin semua masyarakat lainnya di dunia, seorang pemimpin dalam masyarakat yang berkebudayaan Jawa juga memperhatikan dalam semua komponen kekuasaan yang diperlukan oleh seorang pemimpin secara universal (Soemarsaid Moertono, 1985: 73).

Jadi raja ditempatkan pada tata masyarakat biasa. Sudut pandang ini menimbulkan gagasan tentang raja sebagai kekuasaan politik yang tidak aktif sebagai ratu pinandhita (raja pendeta) dimana memancarkan pengaruh yang dermawan dan meresapi seluruh kerajaannya. Tugas-tugas utama raja dalam bidang politik adalah menjaga jangan sampai ada gangguan-gangguan dan memulihkan ketertiban kalau terjadi keadaan yang kacau. Penekanan atas penjagaan terhadap perselisihan dinyatakan dalam njaga tata tentreming praja (menjaga ketertiban dan ketenangan negara). Jadi campur tangan raja dianggap perlu bila keadaan yang tidak normal (G. Moedjanto, 1987: 45).

Legitimasi kekuasaan Jawa dapat dilihat menurut Moedjanto, bagaimana dalam konsep kekuasaan raja di Jawa adalah penuh atau mutlak. Bila kita lihat kekuasaan raja di dalam bahasa pedalangan yaitu dikatakan “gung binathara bau dhendha hanyakrawati, bagaimana mempunyai arti kekuasaan sama dengan kekuasaan dewa, sebagai pemelihara hukum dan juga sebagai penguasa dunia. Oleh sebab itu kedudukan raja dikatakan wenang wisésa ing sanagari, oleh sebab itu raja memegang kekuasaan yang tertinggi di seluruh wilayah kerajaan sebagai seorang penguasa tunggal (G. Moedjanto, 1987: 45), (Eddy Supriyatna Marizar, 2013: 91).

Tanggung jawab yang diemban yang dikarenakan oleh kekuasaan yang tidak terbatas itu dan secara tunggal serta luas guna mempertahankan ketertiban dunia, oleh sebab itu raja harus luar biasa keunggulan dan kecakapannya. Kekuasaan raja yang tidak terbatas tersebut tidak dapat diatur dengan cara-cara duniawi, akan tetapi dalam dirinya mempunyai kekuatan yang menggambarkan ruh dewa atau jiwa Illahi yang dapat mengendalikan kehendak pribadinya. Orang Jawa menganggap raja ideal adalah raja yang terus-menerus mencari tuntunan Illahi di dalam hatinya. Tuntunan Illahi akan menyatakan diri dalam bentuk kebijaksanaan raja, suatu kemampuan yang jarang dimiliki dan dihargai sangat tinggi yang tak hanya memberikan pemiliknya pengetahuan yang luas dan sebanyak-banyaknya, tetapi juga kesadaran dalam hal keadilan. Kebijaksanaan menyatakan dalam keterampilan yang tertinggi tidak saja hanya dalam menimbang secara seksama dalam masalah untung dan rugi keputusan seseorang juga kemampuan dalam membuat penilaian yang tajam dalam menanggulangi keadaan alam. Dalam praktiknya menjadi kebijaksanaan untuk menyapa keseimbangan yaitu menghindarkan pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam masyarakat atau bawahannya (Soemarsaid Moertono, 1985 44).

Di dalam Serat Rama kebijaksanaan raja ditampilkan dalam bentuk sikap-sikap raja yang terkenal dengan Asta Brata. Asta Brata atau delapan aturan kehidupan atau delapan kebijakan negarawan di mana sifat raja disamakan dengan kebijakan delapan dewa dalam pantheon agama Hindu. Delapan dewa tersebut adalah dewa-dewa Lokapala atau dewa pengawal alam semesta, empat yang pertama untuk keempat mata angin dan kemudian diperluas menjadi delapan supaya meliputi arah-arah yang terletak di antara keempat arah mata angin yang utama. Dewa-dewa yang dimaksud yaitu adalah dewa Indra, dewa Yama, dewa Surya, dewa Candra, dewa Bayu, dewa Kuwera, dewa Baruna dan dewa Brama. Bagaimana kedelapan dewa itu adalah gambaran dalam sifat atau ciri ideal dari seorang raja. Sifat-sifat tersebut yang ada dalam Serat Rama yaitu (Soemarsaid Moertono, 1985: 51): 1). Dana yang tidak terbatas atau kedermawanan menurut dari sifat-sifat Dewa Indra, 2) Kemampuan untuk menekan semua kejahatan, menurut sifat Dewa Yama, 3). Berusaha membujuk dengan ramah dan tindakan yang bijaksana, menurut sifat Dewa Surya, 4). Sifat kasih dan sayang, menurut sifat Dewa Candra, 5). Pandangan yang teliti dan pikiran yang dalam, menurut sifat dari Dewa Bayu, 6). Kedermawanan dalam memberikan harta benda dan hiburan, menurut dari sifat Dewa Kuwera 7). Kecerdasan yang tajam dan cemerlang dalam menghadapi kesulitan macam apapun, menurut dari sifat Dewa Baruna, 8). Keberanian yang berkobar dan tekad yang kuat dalam melawan musuh, menurut dari sifat Dewa Brama. Sifat-sifat tersebut sesungguhnya ialah pengertian tentang masalah-masalah kebijaksanaan negara, yang di antaranya kasih hati yang pemurah maupun kekerasan yang tak kenal ampun dan tidak melupakan arti penting harta benda ataupun daya kecerdasan, tetapi sifat-sifat ini juga menekankan tuntutan luas biasa menjadi sifat yang harus dipunyai oleh seorang raja.

Di dalam isi Serat Rama adalah suri tauladan raja sebagai prasyarat raja yang ideal. Raja berkewajiban guna memberikan keteladanan kepada rakyatnya, dan rakyat harus mengikuti tindakan raja, syarat lain yang menjadi pokok bagi seorang raja yang ideal adalah mempunyai kemampuan guna memilih pegawai-pegawai. Keseimbangan itu adalah unsur yang penting dalam menentukan sebuah pilihan. Ranggawarsita menyampaikan empat hal yang harus senantiasa diperhatikan oleh seorang Raja. Perhatian yang pertama adalah pengaturan birokrasi (aparatur pemerintah) dan pelaksanaan pemerintah. Perhatian yang kedua adalah pengawasan atas pegawai-pegawainya yang dilaksanakan secara halus dan tidak kelihatan memaksakan kehendaknya. Perhatian ketiga adalah mengetahui situasi di semua bagian kerajaan agar dapat membantu memberikan pertolongan kapan saja diperlukan. Keempat menghukum para pelaku kejahatan atau menjaga keamanan kerajaan. Meskipun posisi raja sangat tinggi hubungan dengan rakyatnya tidaklah bersifat impersonal melainkan sangat personal. Rakyat yang disebut kawula meskipun kedudukannya rendah dalam pola kepemimpinan dianggap termasuk dalam suatu keluarga, dengan raja sebagai kepala keluarga. Jadi pola kepemimpinan Jawa pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai kepemimpinan paternalistik (Soemarsaid Moertono, 1985: 61).

Konsep kawula-gusti juga diwamai oleh suatu kepercayaan bahwa nasib seseorang telah ditentukan. Hal ini terungkap pada kata-kata “wis pinesthi” atau “wis tinitah”. Dari konsep ini kemudian lahir dua strata sosial dalam masyarakat Jawa, yaitu wong cilik yang merupakan golongan masyarakat kebanyakan dan priyayi yang merupakan kelas penguasa. Orang Jawa dengan jiwa imajinasinya menggambarkan kesatuan kawula gusti dengan sebilah keris. Dua bagian dari keris ini yaitu warongko dan curigo. Ditafsirkan secara mistik Warongko diartikan

rakyat dan curiga diartikan Sebagai raja. Dengan demikian menggambarkan adanya hubungan yang saling mendukung dan adanya rasa ketergantungan di antara keduanya.

Mengetahui adanya sebuah kebutuhan guna saling menyempurnakan, belum sempurnalah suatu hal bila salah satu belum melengkapi bagian yang satu dengan lainnya. Pengungkapan model kawula-gusti juga menggambarkan tentang adanya hubungan antara “*pamomong*” alau “*pamong*” dengan yang “*dimong*”. Bagaimana konsep itu sering dinamai sebagai konsep “*momongan*”. Konsep momongan berawal dari kata “*momong*” yang mempunyai berarti menjaga, dan biasanya kata itu untuk melukiskan bimbingan dari seorang pelayan kepada anak tuannya. Mengungkapkan tugas dan tanggung jawab yang cukup berat bagi para penjaga dibandingkan yang dijaganya. Pemanfaatan kata momongan ini memiliki peranan politik yang melukiskan kedekatan hubungan raja terhadap rakyat, di samping itu juga memberikan penekanan yang lebih tinggi kepada peranan seorang raja dan dibanding dengan rakyat (Akhmad Setiawan, 1998: 21).

#### 4. Simpulan

Kekuasaan raja tidak dapat dilepaskan dari konsep Spiritual yang berasal dari kultur atau budaya India, yaitu kepercayaan adanya kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara jagat raya dan dunia manusia. Bagaimana konsep raja Mataram Islam memiliki kekuasaan sentral dalam wilayah negaranya. Keabsahan dan legitimasi kedudukan, serta kekuasaan raja diperoleh karena warisan menurut tradisi dalam bentuk peninggalan feodalisme. Konsep Dewa Raja yang dipandang sebagai pusat dari kosmos dan dari diri raja terpancar kekuatan yang terpengaruh pada alam pikir manusia di wilayah kerajaan Mataram. Anggapan ini dikaitkan dengan kepercayaan magis dari wahyu raja pulung raja) dan konsep tentang pewaris keturunan wahyu raja. Wujud ideal kekuasaan Jawa dapat tersecrmin dari kesatuan politik yang dikombinasi dengan terpadu dengan konsep dari kekuasaan jagat raya ini hal ini terlihat pada gelar yang digunakan oleh raja keturunan Mataram. Konsep kekuasaan raja di Jawa adalah penuh atau mutlak. Bila kita lihat kekuasaan raja di dalam bahasa pedalangan yaitu dikatakan “gung binathara bau dhendha hanyakrawati, bagaimana mempunyai arti kekuasaan sama dengan kekuasaan dewa, sebagai pemelihara hukum dan juga sebagai penguasa dunia. Oleh sebab itu kedudukan raja dikatatan *wenang wisésa ing sanagari*, oleh sebab itu raja memegang kekuasaan yang tertinggi di seluruh wilayah kerajaan sebagai seorang penguasa tunggal.

#### References

- Akhmad Setiawan, 1998, *Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Pabam Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andriyanto, Muslikh, Peranan Pesisir Dalam Proses Islamisasi di Nusantara, *Keraton : Journal of History Education and Culture Vol. 1, No. 1*, Juni 2019, halaman 8-18.
- Ardian Kresna, 2011, *Sejarah Panjang Mataram, Menengok Berdirinya Kesultanan Yogyakarta*, Jogjakarta: Diva Press.
- Benedict Anderson R. O’G, 2000, *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*, Terj. Ruslani. Yogyakarta: Penerbit Qalam.

- Daliman, 2012, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Darsiti Socratman, 1989, *Kebudayaan Kraton Surakarta 1930-1939*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- David Betham, 1990, *Birokrasi Terjemahan Sabat Simamora*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Drs. Supriadi, M.Hum., 2017, *Dinamika Kehidupan Religius Era Kasunanan Surakarta*, Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Dr. H.J. De Graaf, 1987, *Awal Kebangkitan Mataram, Masa Pemerintahan Senapati*, Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers.
- Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kuntowijoyo, 2017, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Moedjanto, G, 1987, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius.
- Poerwadarminto, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Selo Soemardjan, 1990, *Perubahan Sosia di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sengupta, Arputha Rani (Ed.) (2005). *God and King : The Devaraja Cult in South Asian Art & Architecture (National Museum Institute Monograph Series No. 2)*. New Delhi: Regency Publications.
- Soemarsaid Moertono, 1985, *Negara dan Bina Usaha Negara di Jawa Masa Lampau. Studi Tentan Masa Mataram II abad VI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.